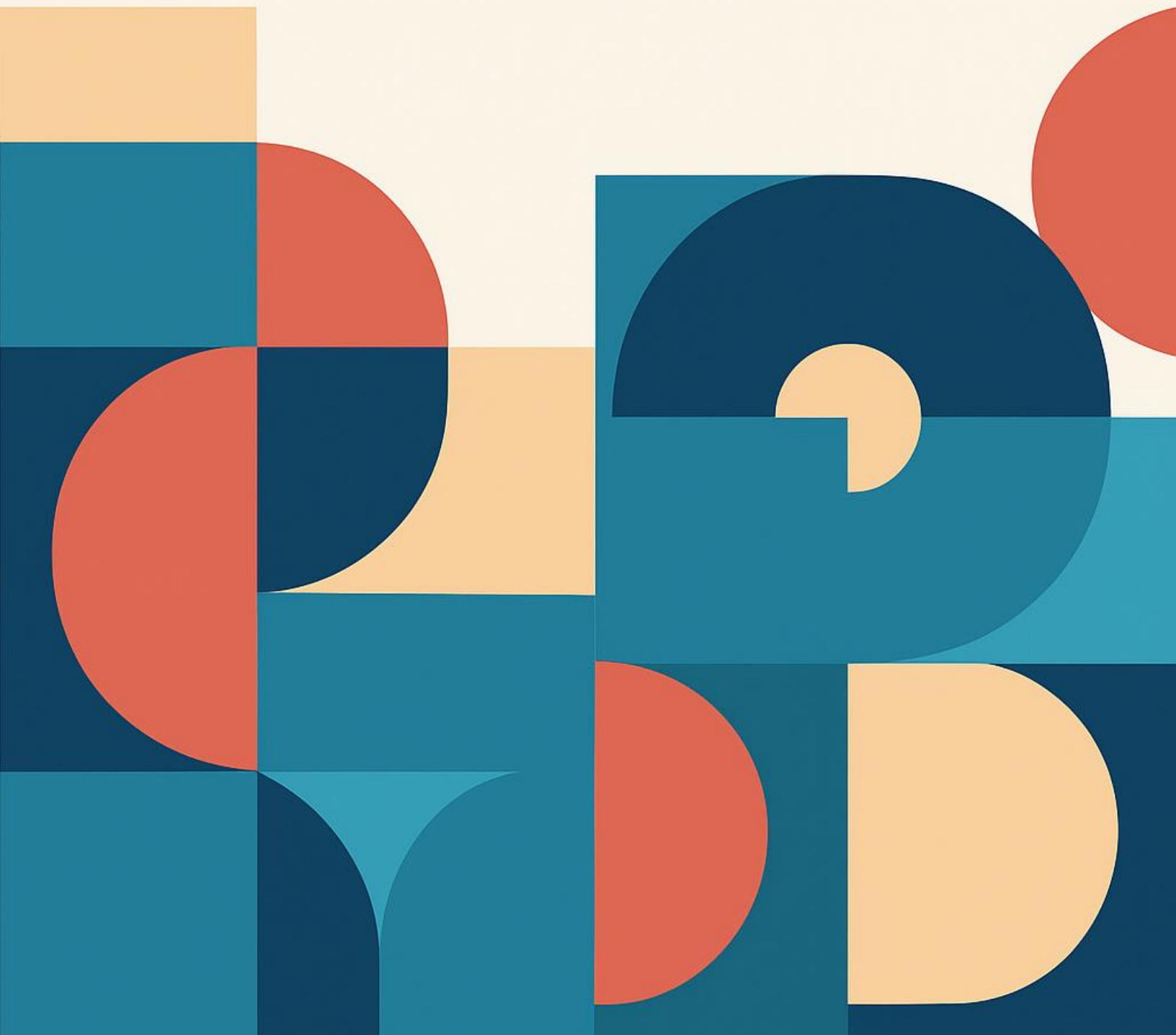


**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN**  
**FORUM KONSULTASI PUBLIK**  
**(FKP)**  
**KECAMATAN LUAK**  
**TAHUN 2025**



# DAFTAR ISI

## **BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Tujuan Pelaksanaan FKP
3. Ruang Lingkup

## **BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP**

1. Sumber Input dan Tema FKP
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
3. Penyelenggara dan Peserta FKP
4. Metode Pelaksanaan FKP

## **BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP**

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

## **BAB IV. PENUTUP**

### **LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI**

### **LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR**

### **LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN**

### **LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN**

### **LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Kantor Camat Kecamatan Luak

### **2. Tujuan Pelaksanaan FKP**

**Pelaksanaan FKP Kecamatan Luak Tahun 2025 bertujuan untuk :**

- a) Menyerap Aspirasi Masyarakat:** Forum ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat di Kecamatan Luak agar pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan warga setempat.
- b) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:** Melalui forum ini, diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga keputusan yang diambil lebih inklusif.
- c) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:** Dengan adanya forum konsultasi publik, pemerintah kecamatan dapat memberikan informasi tentang

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat memahami tujuan, anggaran, serta target yang ingin dicapai.

**d) Evaluasi Program yang Telah Berjalan:** Selain menyusun rencana pembangunan, forum ini juga menjadi wadah evaluasi terhadap program yang sudah berjalan sehingga bisa diperbaiki atau diperbaiki untuk masa depan.

**e) Menggalang Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat:** Forum ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **Manfaat Forum Konsultasi Publik Kecamatan Luak Tahun 2025:**

**a) Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Responsif:** Aspirasi dan masukan dari masyarakat dapat menyuburkan perencanaan pembangunan sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

**b) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat:** Partisipasi aktif masyarakat dalam forum ini dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah daerah, karena mereka merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

**c) Menghasilkan Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran:** Dengan memahami secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan tepat sasaran.

**d) Mengoptimalkan Sumber Daya:** Forum ini membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat.

**e) Mendorong Pembangunan yang Berkelanjutan:** Melalui kolaborasi dan konsultasi publik, pembangunan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang demi kesejahteraan bersama.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Luak Tahun 2025 mencakup berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi perhatian masyarakat. Cakupan tersebut meliputi:

#### **a) Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum**

Pembahasan perencanaan dan perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, drainase, penerangan jalan umum, serta fasilitas publik lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat Kecamatan Luak.

#### **b) Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial**

Diskusi mengenai peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**c) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan**

Pembahasan program pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi warga.

**d) Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**

Pembahasan pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, mitigasi bencana, konservasi sumber daya alam, serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana.

**e) Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum**

Isu terkait keamanan lingkungan, penyelesaian konflik, peningkatan kenyamanan masyarakat, serta penguatan koordinasi dalam menjaga ketertiban umum.

**f) Bidang Sosial, Budaya, dan Pariwisata**

Pembahasan mengenai pelestarian budaya dan tradisi lokal, pemberdayaan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

**g) Evaluasi Program Tahun Sebelumnya**

Peninjauan hasil pelaksanaan program tahun sebelumnya untuk mengetahui capaian, hambatan, dan langkah perbaikan yang diperlukan agar program berikutnya lebih optimal.

**h) Usulan dan Aspirasi Masyarakat untuk Perencanaan Tahun 2025**

Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan aspirasi terkait prioritas pembangunan di tahun 2025, agar rencana yang disusun sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.

**Ruang Lingkup FKP dalam Perspektif Pelayanan Publik**

Selain cakupan bidang di atas, FKP Kecamatan Luak Tahun 2025 juga mencakup aspek-aspek penting dalam peningkatan pelayanan publik, antara lain:

**a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan (Musrenbang).

**b) Transparansi dan Akuntabilitas**

Penyampaian informasi terkait perencanaan dan realisasi program, anggaran, serta hasil kegiatan pembangunan kepada masyarakat.

**c) Pengawasan dan Evaluasi**

Pelibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata.

**d) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Upaya peningkatan kualitas layanan administrasi, pencatatan sipil, perizinan, dan pelayanan publik lainnya di tingkat kecamatan.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN FKP**

#### **1. Sumber Input dan Tema FKP**

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Luak Tahun 2025 didasarkan pada berbagai data dan masukan yang relevan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan aparatur, koordinasi lintas sektor, serta data pendukung seperti pendidikan dan kemiskinan.

Sumber Input Utama:

1. **Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)** sebagai gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. **Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025** serta hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kecamatan Luak.

Tema yang Diusulkan:

- *Peningkatan Pelayanan Publik dan Aparatur Menuju Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Luak Tahun 2025.*
- *Sinergi Pelayanan Publik, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Luak Tahun 2025.*
- *Memperkuat Kapasitas Aparatur dan Layanan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan di Kecamatan Luak.*

Tema-tema tersebut menjadi landasan pembahasan untuk merumuskan prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

a. Waktu Pelaksanaan

- **Hari:** Rabu
- **Tanggal:** 26 Februari 2025

b. Tempat Pelaksanaan

FKP dilaksanakan di **Aula Kantor Camat Luak.**

#### **3. Penyelenggara dan Peserta FKP**

FKP diselenggarakan melalui dua metode, yaitu **offline (tatap muka)** dan **online (dalam jaringan)** yang melibatkan unsur kecamatan, perangkat nagari, dan OPD tingkat kabupaten.

a. Penyelenggara (Offline / Tatap Muka)

- 1) Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil III
- 2) Kapolsek Luhak
- 3) Danramil 04 Luhak
- 4) Kepala KUA Luak

- 5) Kepala UPTD Puskesmas Mungo
- 6) Koordinator Lapangan KB Kecamatan Luak
- 7) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Luak
- 8) Wali Nagari se-Kecamatan Luak
- 9) PD/PLD Kecamatan Luak

b. Peserta dari OPD (Online / Dalam Jaringan)

- 1) Kepala Dinas Perikanan
- 2) Kepala Dinas Kesehatan
- 3) Kepala Dinas Keswan
- 4) Kepala Dinas PUPR
- 5) Kepala DP2KBP3A
- 6) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 7) Kepala Diskominfo
- 8) Kepala DPMDN
- 9) Kepala Distanhorbun
- 10) Kepala Disparpora
- 11) Kepala Dinas Pangan

#### 4. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara OFFLINE / Tatap Muka dan ONLINE Dalam Jaringan

##### Susunan Acara FKP:

*PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2026  
DAN FORUM RKPD 2025 OPD DI KECAMATAN LUAK*

URAIAN	KETERANGAN
<b>PEMBUKAAN</b>	
PENDAFTARAN / REGISTRASI	PESERTA RAPAT /UNDANGAN OFFLINE DAN ONLINE
LAGU INDONESIA RAYA	DIKUTI SELURUH UNDANGAN DAN PESERTA RAPAT BAIK SECARA OFFLINE MAUPUN ONLINE/DURING
PEMBACAAN DOA	OLEH KUA LUAK / MEWAKILI
SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN RAPAT PLENO MUSRENBANG	DISAMPAIKAN OLEH CAMAT LUAK DAN DARI BAPELITBANG : PENYAMPAIAN VISI DAN MISI BUPATI TERPILIH 2025-2030, PENYAMPAIAN ANGGARAN.
<b>SIDANG PLENO I</b>	
PENYAMPAIAN MATERI / INFORMASI DARI NARASUMBER BEBERAPA OPD	PENYAMPAIAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH OLEH OPD YANG DILAKSANAKAN DI NAGARI TAHUN 2025 MELALUI DURING/ ONLINE/ZOOM MEETING (BEKERJASAMA DENGAN DINAS KOMINFODIGI) , OPD BERIKUT : 1. BAPELITBANG 2. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3. DINAS KESEHATAN

	<p>4. DINAS PERIKANAN 5. DINAS P2KBP3A</p>
<p>PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN RKPD TAHUN 2026</p>	<p>1. PENYAMPAIAN DU RKPD 2025 KECAMATAN LUAK OLEH PIMPINAN RAPAT/ MODERATOR MELALUI APLIKASI SIPD KEMENDAGRI. 2. PENYAMPAIAN DU RKPD TAHUN 2026 USULAN 4 NAGARI DENGAN 10 USULAN PRIORITAS, DARI NAGARI : * MUNGO * ANDALEH * SUNGAI KAMUYANG * TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG</p>
<p>DISKUSI PESERTA RAPAT</p>	<p>MASUKKAN DARI KETUA BAMUS SUNGAI KAMUYANG ; *TAHUN INI MEMASUKKAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETAHANAN PANGAN DI NAGARI *BELUM ADANYA KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN LUAK YANG BERTUJUAN MENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT SEPERTI : PENGADAAN AIR BAKU UNTUK TIGA NAGARI ANTARA NAGARI MUNGO, ANDALEH DAN SUNGAI KAMUYANG SEBAGAI TEMPAT SUMBER AIR DENGAN ADANNYA LAHAN 200 HEKTAR. *BELUM ADANYA SK BUPATI TENTANG IRIGASI , JALAN YANG DI REVISI ULANG. *PENATAAN IBUKOTA KECAMATAN SEPERTI PERBAIKKAN DISEKITAR KANTOR CAMAT, PASAR, PAGAR DAN HALAMAN KANTOR CAMAT BELUM ADANYA REGULASI KEBUDAYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT</p>
<p><b>SIDANG PLENO II</b></p>	
<p>PEMBACAAN DAN PENANDA TANGANAN BERITA ACARA</p>	<p>1. PENANDA TANGANAN BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN OLEH PERWAKILAN PESERTA UNDANGAN RAPAT OFFLINE 2. TIM DELEGASI KECAMATAN LUAK YANG AKAN IKUT MUSRENBANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 3. DU RKPD TAHUN 2026 DARI 4 NAGARI YANG MENJADI 10 SKALA PRIORITAS DAN DAFTAR USULAN SKALA PRIORITAS ANTAR NAGARI/ UNTUK KECAMATAN.</p>

## BAB III

### HASIL PELAKSANAAN FKP

#### 1. Identifikasi Masalah

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam Februari 2025, bertempat di Aula Kantor Camat Luak secara Offline dan Online telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Kecamatan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan antara lain:

- Camat Luak
- Anggota DPRD Kab. Lima Puluh Kota Dapil III
- Kapolsek Luak
- Danramil 04 Luak
- Kepala UPTD Puskesmas Mungo
- Wali Nagari Se Kec.Luak
- Kepala KUA Kec. Luak
- PD/PLD Kec. Luak
- Kepala Dinas Perikanan
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Keswan
- Kepala Dinas PUPR
- Kepala DP2KBP3A
- Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- Kepala Diskominfo
- Kepala DPMDN
- Kepala Distanhorbun
- Kepala Dinas Diparpora
- Kepala Dinas Pangan

#### 2. Analisis

##### Identifikasi Masalah Utama

- **Infrastruktur** : Keluhan mengenai jalan rusak, jaringan air bersih yang tidak memadai, dan akses internet yang terbatas di daerah tertentu.
- **Kesehatan** : Kurangnya fasilitas kesehatan di wilayah nagari dan minimnya tenaga medis di beberapa Puskesmas.
- **Pendidikan** : Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai, terutama di sekolah-sekolah di daerah terpencil.
- **Lingkungan** : Isu penanganan sampah yang belum optimal dan ancaman banjir di musim hujan akibat buruknya sistem drainase.

## 2. Program Prioritas Pembangunan

- **Peningkatan Infrastruktur** : Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, dan saluran air untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
- **Pelayanan Kesehatan** : peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan klinik baru dan penyediaan tenaga medis yang kompeten.
- **Pendidikan** : Pengadaan sarana pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas baru, dan peningkatan kualitas pengajaran dengan pelatihan guru.
- **Pengelolaan Lingkungan** : Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan perbaikan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir.

## 3. Kendala dan Tantangan

- **Anggaran Terbatas** : Dana pembangunan yang terbatas menjadi kendala dalam merealisasikan semua usulan masyarakat.
- **Koordinasi Antar Instansi** : Terkadang terdapat hambatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau instansi terkait, sehingga beberapa program pembangunan terhambat.
- **Partisipasi Masyarakat** : Partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang belum maksimal karena minimnya sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya forum ini.

## 4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- **Optimalisasi Anggaran** : Penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien dengan memprioritaskan program yang benar-benar mendesak sesuai kebutuhan masyarakat.
- **Penguatan Koordinasi** : Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah agar program pembangunan berjalan sesuai rencana.
- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat** : Dilakukan lebih banyak sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Musrenbang dan cara partisipasinya.

## 5. Hasil Usulan Prioritas Masyarakat

- Pembangunan jalan penghubung antar desa.
- Pembuatan bendungan kecil untuk pengendalian banjir di wilayah rawan.
- Peningkatan fasilitas pendidikan dan peralatan belajar mengajar di beberapa sekolah.
- Program penanaman pohon dan kebersihan lingkungan untuk mencegah erosi dan banjir.

Analisis semacam ini membantu pemerintah dalam menetapkan skala prioritas pembangunan yang didasarkan pada masukan langsung dari masyarakat, sehingga pelaksanaan Musrenbang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

### **3. Rencana Aksi**

#### **1. Pembahasan Rencana Pembangunan**

- Forum ini membahas usulan rencana pembangunan di tingkat kecamatan yang bersumber dari hasil Musrenbang tingkat nagari atau kelurahan.
- Tujuannya untuk menyelaraskan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang akan diusulkan ke Musrenbang tingkat kabupaten/kota.

#### **2. Identifikasi dan Pemilahan Masalah**

- Forum ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di kecamatan dan memilah masalah mana yang menjadi prioritas.
- Menilai usulan mana yang relevan untuk diangkat berdasarkan kebutuhan masyarakat.

#### **3. Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat**

- Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan di wilayah kecamatan. Forum ini memberikan ruang bagi masyarakat sipil, lembaga kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok lainnya untuk berpartisipasi.

#### **4. Program Konsultasi dan Sinkronisasi**

- Konsultasi dilakukan antara pihak kecamatan, perwakilan desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta instansi terkait untuk sinkronisasi program agar tidak tumpang tindih dan selaras dengan visi pembangunan daerah.

#### **5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang**

- Forum ini juga digunakan untuk mendengarkan hasil pelaksanaan Musrenbang sebelumnya dan menyatukan tindak lanjut dari hasil-hasil Musrenbang yang sudah diimplementasikan.

#### **6. Pembentukan Tim Pengusul**

- Setelah melalui konsultasi dan diskusi, forum ini akan membentuk tim yang akan membawa hasil musyawarah ke tingkat Musrenbang kabupaten/kota untuk diperjuangkan dalam rencana pembangunan daerah.

## **BAB IV PENUTUP**

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Luak Tahun 2025 telah berjalan dengan baik berkat dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat kecamatan, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat pengguna layanan. Melalui FKP ini, berbagai masukan, saran, dan harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dihimpun secara terbuka dan partisipatif.

Hasil FKP ini diharapkan menjadi acuan penting dalam penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Luak, serta mendorong terwujudnya pelayanan yang semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen bersama antara pemerintah kecamatan dan seluruh unsur masyarakat menjadi kunci utama dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah dirumuskan.

Demikian laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Luak Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dokumentasi proses dan hasil kegiatan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan pelayanan publik ke depan.

## LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI

### BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2026 DI KECAMATAN LUAK TAHUN 2025

Pada hari RABU tanggal DUA PULUH ENAM bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA bertempat di AULA KANTOR CAMAT LUAK KECAMATAN LUAK telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan-sambutan yang di sampaikan oleh:  
Muhammad Abrar, S.Sos dari Camat Luak  
Khairul Abrar, ST dari Bapelitbang

Pada acara pembukaan musrenbang kecamatan

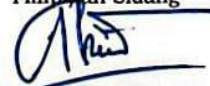
2. Pemaparan materi yang disampaikan oleh :  
Risman, ST dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga  
Elsi Risalma P. Apt. dari Dinas Kesehatan  
Afrinchayani, S.Pt dari Dinas Perikanan  
Anton, S Apt. dari Dinas P2KBPA
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah terangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang kecamatan, maka pada :  
Hari/Tanggal : Rabu / 26 Februari 2025  
Jam : 08.30 WIB sd selesai  
Tempat : Aula Kantor Camat Luak

Seluruh peserta Musrenbang KECAMATAN LUAK :

#### MENYEPAKATI









- KESATU : Kegiatan prioritas yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan KECAMATAN LUAK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam SIPD dan Lampiran Berita Acara ini.
- KEDUA : Hasil kesepakatan sidang-sidang Musrenbang KECAMATAN LUAK, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dan daftar hadir peserta Musrenbang Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

Pakan Sabtu , 26 Februari 2025  
Pimpinan Sidang



(MUHAMMAD ABRAR, S.Sos)

#### Mewakili Peserta Musrenbang KECAMATAN LUAK

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	NO TELEPON/HP	TANDA TANGAN
1	Dr. Melita Wicakana	Pustrus Mungo	08128831579	
2	Rosl Anggraini	B.K.	085274669848	
3	Deswandi	Bamus.		
4	Anas Raal	PD	085263248997	
5	ARRIZAL MASRI	Delegasi Mungo	08126326661	
6	Rini Sumorini, S.SP	BPKB Wak	085274639001	
7	GUSLINDA	B. KANDUANG	085272293832	
8	WIRDAWATI	DELEGASI	085263827505	

**LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR**

FORMAT 2

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANG KECAMATAN  
NOMOR : 01 / CU/2025  
Tanggal : 26 FEBRUARI 2025

**DAFTAR HADIR**

**PESERTA MUSRENBANG RKPD TAHUN 2026 KECAMATAN LUAK**

Hari / Tanggal : Rabu / 26 Februari 2025

Tempat : Aula Kantor Camat Luak

No	NAMA	LEMBAGA /INSTANSI /UNSUR	NO TELP/HP	TANDA TANGAN
1	Anas Rival	PD	085263248007	[Signature]
2	Rini Sundari	Korlap KB	085274634001	[Signature]
3	Pesi Anggrini	B.H.	05274664048	[Signature]
4	WIRDAWATI	tim DELEGASI MUNGO	0852 6382 7505	[Signature]
5	ABRIAL MASRI	tim DELEGASI MUNGO	0813 6326 6561	[Signature]
6	JEKRI	KLIA KRC LUAK	0852 7400 1270	[Signature]
7	NOFFRAL	Delegasi SITAPA	0852 6484 7081	[Signature]
8	dr. Makhawati	puskesmas Mungo	0852 6377 7725	[Signature]
9	Fitria	puskesmas Mungo	0813 6376 0310	[Signature]
10	ISRAEL	WNU Sei Kanyang	0855 6376 4779	[Signature]
11	Nofizal	WU Rtp	0822 3421 1871	[Signature]
12	MHD. SUHARDI	W.N MUNGO	0812-6600-7113	[Signature]
13	Deswardi	Banrus Sei Kanyang		[Signature]
14	INTAN YUNITA	g/n Korwil Luak		[Signature]
15	Nerha Supren	Karangin Andaloh	082283468577	[Signature]
16	GUSLINDA	NAGARI ANDALEH	08527259012	[Signature]
17	SEPTI ILWATI	Kasi Kesra		[Signature]
18	NOVRIZON	Staf Umum		[Signature]
19	Roni Purn	TJ Haro Gileh		[Signature]
20	MULYADI	KEC LUAK	082390735214	[Signature]
21	Wisnawati	Khayangan	085365929450	[Signature]
22	HERRY WANDA	Sekang TJ Haro Sikab PBJ	0852 4603 8111	[Signature]
23	Prima Dian Sari	pembudayaan	085359959530	[Signature]
24	fahrizal	Delegasi Sei Kanyang	08239149-5969	[Signature]
25	Rila Oktavia	Kasi PPM	082181902868	[Signature]

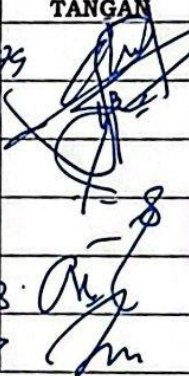
Pakan Sabtu, 26 Februari 2025

CAMAT LUAK

[Signature]

MUHAMMAD ABRAR, S.Sos  
Nip. 19731103 199303 1 001

**TIM DELEGASI KECAMATAN LUAK  
PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD  
KABUPATEN LIMA PULUH Kota**

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	NO TELEPON/HP	TANDA TANGAN
1	ISAEL	WN SKM	0853 636 1725	
2	MUHAMMAD SUHARDI	W.N MUNGO	0812 6600 713	
3	NOFRIZAL	UM TSP	082364221071	
4	SYAIRUL UMHID	WN. Andaleh.	08527446436	
5	M. Abrar-S.Sos	Kecamatan	081363413248	
6	PESI Anggraini.	B.K	085274664828	

Pakan Sabtu, 26 FEBRUARI 2025

CAMAT LUAK



Muhammad Abrar, S.Sos  
NIP.197311031993031001

## LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

### KECAMATAN LUAK

Jl. Raya Payakumbuh-Lintau KM 08 Pakan Sabtu, Telp. (0752)759420 Kode Pos 26261  
Website : <http://kec-luak.limapuluhkotakab.go.id> Email : [kecamatan.luak.50kota@gmail.com](mailto:kecamatan.luak.50kota@gmail.com)

Nomor : 005 / 18 / CL / II / 2025  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Undangan Pelaksanaan Musrenbang  
RKPD Tahun 2026 di Kecamatan dan  
Forum Perangkat Daerah Tahun 2025  
Kecamatan Luak

Pakan Sabtu, 24 Februari 2025

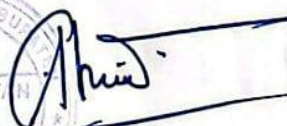
Kepada Yth :  
Daftar Undangan Terlampir  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 000.7.1.4/039/5/Bappelitbangda-LK/II/2025, tanggal 18 Februari 2025 perihal Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kecamatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kecamatan merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD Kabupaten Lima Puluh Tahun 2026 melalui pendekatan bottom-up, sebagai implementasi dari hasil Musrenbang Tingkat Nagari.
2. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Luak
3. Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 di Kecamatan Luak akan dilaksanakan Pada :  
Hari / Tanggal : Rabu / 26 Februari 2025  
Jam : 08.30 s/d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Camat Luak
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami undang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk hadir pada acara dimaksud khusus bagi Wali Nagari se-Kecamatan Luak agar menghadirkan 2 (dua) orang Tim Delegasi yang terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan perempuan, serta membawa Salinan Berita Acara Hasil Musrenbang Tingkat Nagari.

Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

  
MUHAMMAD ABRAR, S.Sos  
Pembina Tingkat I / (IV.b)  
NIP. 19731103 199303 1 001

Tembusan:

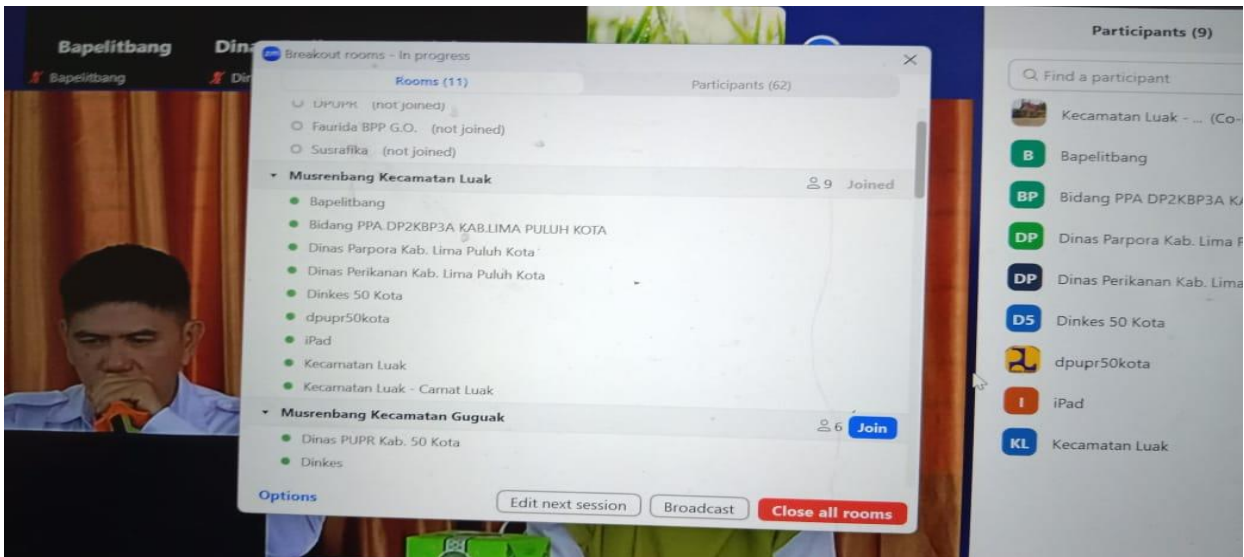
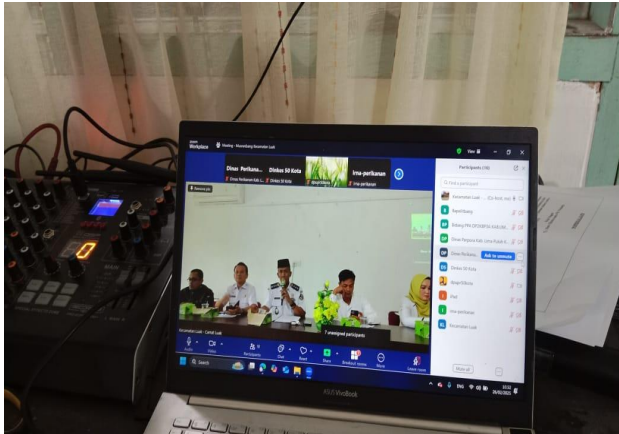
1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Kepala Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Inspektur Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak

**LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN**

**DOKUMENTASI  
MUSRENBANG RKPD TAHUN 2026  
DAN FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KECAMATAN LUAK  
DI AULA KANTOR CAMAT LUAK  
RABU / 26 FEBRUARI 2025**

**Visi : “ Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang maju, Sejahtera Dan Bermartabat Dengan Semangat Saiyo Sakato Menuju Lima Puluh Kota Bangkit, Menang Dan Berkelanjutan ”.**

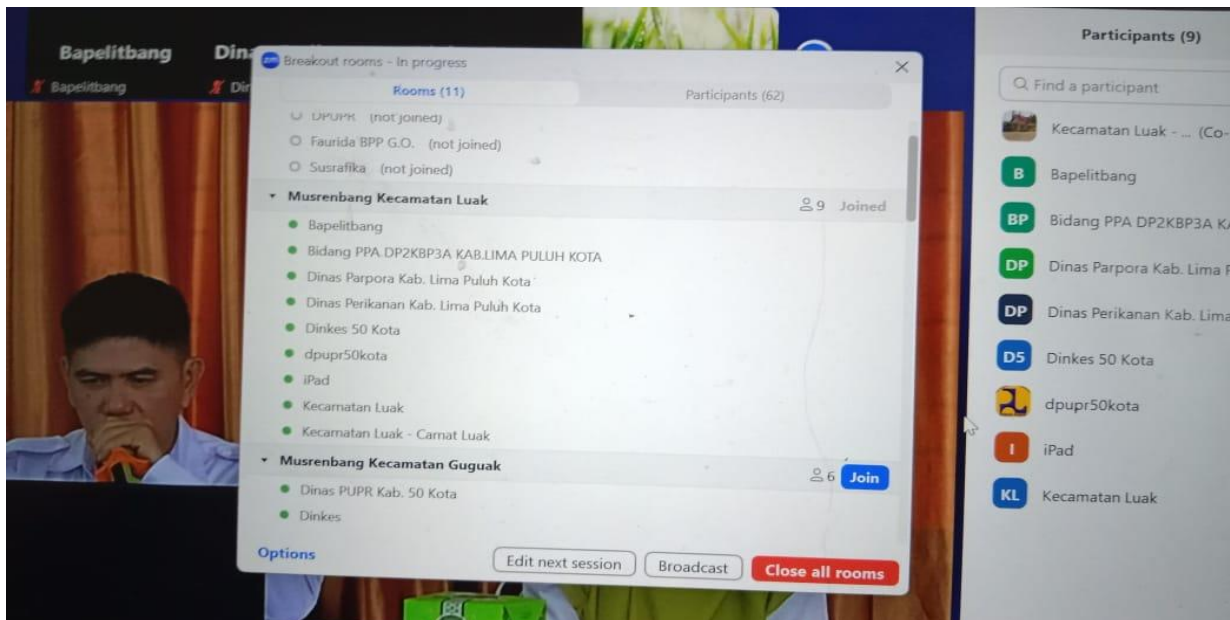


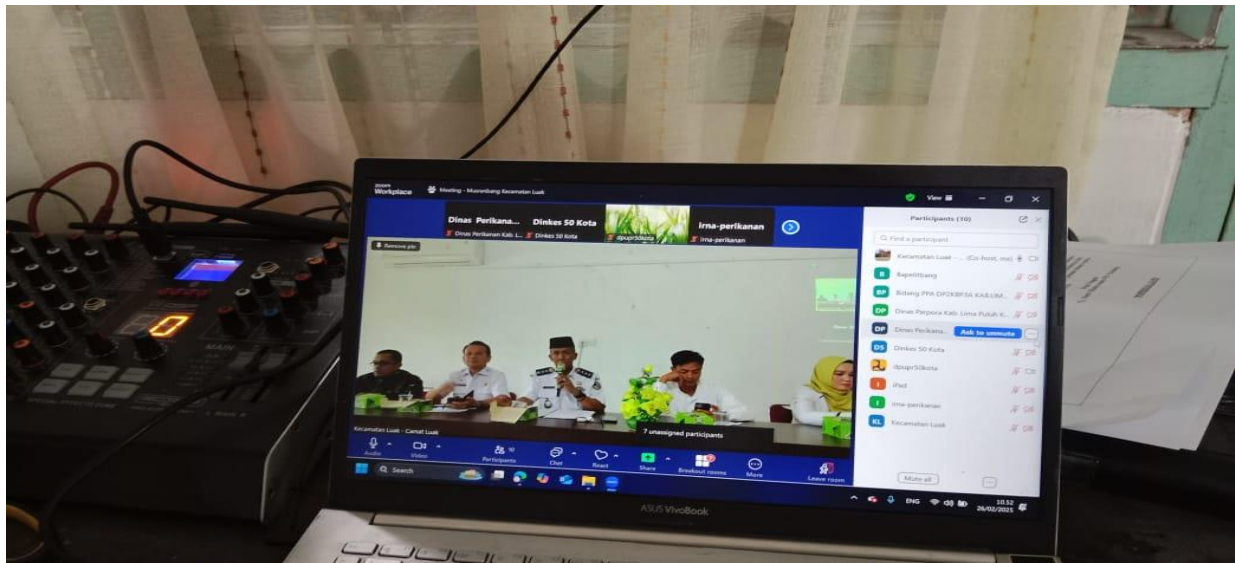






**PESERTA ONLINE ZOOM MEETING OPD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
MUSRENBANG RKPd TAHUN 2026  
DI KECAMATAN DAN FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**





## LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA

Tindak lanjut forum konsultasi publik kec luak tahun 2024

Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Luak tahun 2024 adalah bagian dari mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah tersebut. Tindak lanjut dari forum ini biasanya meliputi beberapa langkah berikut:

1. **Dokumentasi dan Penyusunan Hasil Forum** : Hasil masukan dan aspirasi yang disampaikan dalam forum konsultasi dicatat dan dirangkum. Dokumentasi ini penting untuk memastikan semua masukan masyarakat diakomodasi.
2. **Evaluasi Masukan** : Pemerintah kecamatan bersama pihak terkait akan memberikan masukan dan aspirasi yang relevan untuk kemudian terlibat dalam perencanaan pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk melihat mana yang mungkin dijalankan dalam waktu dekat dan jangka panjang.
3. **Penyusunan Rencana Pembangunan** : Masukan dari forum publik ini biasanya akan masuk ke dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, di mana ide-ide tersebut dibahas lebih lanjut dan dijadikan dasar dalam menentukan program prioritas.
4. **Pengalokasian Anggaran** : Program-program yang diprioritaskan dalam Musrenbang kemudian akan disesuaikan dengan anggaran yang ada, baik dari anggaran kecamatan, kabupaten, maupun dana lainnya yang tersedia.
5. **Penyampaian Informasi Hasil Tindak Lanjut** : Pemerintah biasanya akan memberikan umpan balik kepada masyarakat mengenai program mana yang diakomodasi dan sedang berjalan dalam bentuk transparansi.

**6. Pemantauan dan Evaluasi Program :** Selama pelaksanaan program yang diusulkan, kecamatan akan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan harapan masyarakat.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan pada FKP dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.

#### **1. Rekapitulasi Masukan dan Usulan Masyarakat**

- Menginventarisir seluruh aspirasi, keluhan, dan saran masyarakat dari tiap nagari (Andaleh, Sungai Kamuyang, Mungo, Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang).
- Mengelompokkan usulan berdasarkan bidang: pelayanan publik, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **2. Verifikasi dan Klarifikasi Usulan**

- Melakukan pengecekan data untuk memastikan usulan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- Berkoordinasi dengan perangkat nagari dan stakeholder lokal untuk memastikan prioritas.

#### **3. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**

- Menyusun daftar usulan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, kemanfaatan, dan ketersediaan anggaran.
- Menentukan penanggung jawab untuk tiap program (Kecamatan, Nagari, OPD terkait).

#### **4. Koordinasi dengan OPD Terkait**

- Meneruskan hasil FKP ke dinas terkait seperti: Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan lainnya.
- Mengadakan pertemuan lanjutan untuk sinkronisasi program dengan RKPD Kabupaten.

#### **5. Integrasi ke Dokumen Perencanaan**

- Memasukkan hasil FKP ke dalam RKPD Kecamatan dan dokumen Renja masing-masing perangkat daerah.
- Menjadikan masukan masyarakat sebagai bahan Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan.

#### **6. Monitoring dan Evaluasi**

- Menyusun jadwal pemantauan terhadap pelaksanaan program yang diusulkan dalam FKP.
- Melaporkan perkembangan realisasi kegiatan kepada masyarakat pada pertemuan berikutnya atau melalui website/medsos kecamatan.

## 7. Publikasi Hasil FKP

- Menyampaikan hasil FKP dan rencana tindak lanjut kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
  - Mengumumkan hasil melalui papan informasi kecamatan, media sosial, dan koordinasi dengan wali nagari.
-